

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertanian menjadi salah satu sumber pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia. Sektor pertanian merupakan salah satu mata pencaharian yang memiliki peranan yang penting dalam menyumbang perekonomian negara Indonesia. Peranan tersebut berfungsi untuk mewujudkan ketahanan pangan, terciptanya lapangan kerja, penanganan masalah kemiskinan, pemasok bahan pangan dan bahan baku industri serta sebagai sumber pendapatan masyarakat (Haris Tri Wibowo, 2020) dan menyediakan bahan baku bagi industri-industri berbasis pertanian serta memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara (Nigo, Ayine and Gibogwe,2023). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 pasal 1 pangan merupakan segala sesuatu yang didapat dari sumber daya hayati mulai dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan maupun peternakan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat baik dalam bentuk olahan maupun bahan baku mentah.

Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pangan memiliki makna dan peran yang sangat vital bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan melalui kebijakan ketahanan pangan harus menjadi isu utama dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dimulai dengan membangun sistem pertanian yang berkelanjutan (sustainable agriculture) guna meningkatkan kualitas hidup. Namun, pengelolaan pertanian di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai

masalah, salah satunya adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian (Setiawati et al., 2019). Pengurangan lahan pertanian secara langsung mengakibatkan penurunan kapasitas produksi pangan. Dampaknya bisa berupa kelangkaan pangan, naiknya harga makanan, dan ketidakstabilan pasokan pangan.

Kedua, nasib petani masih dibawah garis kemiskinan, mayoritas adalah petani yang belum bisa menikmati hasil pertanian hal tersebut sejalan dengan permasalahan yang dikutip dari (Sanjani, 2021) salah satunya yakni sistem penjualan hasil panen kepada pengepul. Pernyataan terkait permasalahan petani juga dituturkan (Hafidz & Amalia, 2021) yang mengatakan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi. Beberapa di antaranya termasuk kurangnya pengetahuan dan strategi petani dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi pertanian yang telah ada. Selain itu, ketimpangan harga antara petani dan harga jual kepada konsumen juga menjadi masalah yang dihadapi akibat panjangnya rantai distribusi barang hingga mencapai konsumen. Sejalan dengan itu, menurut (Jumadi et al., 2020) terdapat beberapa kendala antara lain dilihat dari faktor sumber daya manusia, sebagian besar petani berusia di atas 40 tahun dan lebih dari 70 % (persen) petani di Indonesia memiliki pendidikan setara SD atau bahkan di bawahnya. Hal tersebut sejalan dengan artikel yang dimuat oleh [rri.co.id](http://rri.co.id)

**rri.co.id** "Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, petani Indonesia saat ini di dominasi oleh petani kolonial dengan tingkat pendidikan rendah. Sebanyak 70 persen petani Indonesia hanya tamatan Sekolah Dasar (SD), bahkan tidak tamat SD atau tak sekolah. Demikian disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi. Dedi merinci sisanya mereka yang lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya sebanyak 17 persen.

Sementara petani yang lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah dibawah 15 persen. Sedangkan petani yang lulus perguruan tinggi (PT) jumlahnya kurang dari 2 persen” (Dikutip dari <https://www.rri.co.id/nasional/166690/kementan-catat-70-persen-petani-indonesia-berpendidikan-rendah> pada tanggal 14 Mei 2024)

Tingkat pendidikan formal yang rendah hal ini mengakibatkan keterbatasan pengetahuan dalam pengolahan pertanian dan kecenderungan untuk melakukan praktik pertanian yang monoton dan tidak berkembang serta perlunya adaptasi pertanian yang mana akan berpengaruh pada hasil produksi guna memenuhi ketahanan pangan (Jámbor, Jeremiás Máté Balogh, 2020). Ketiga, permasalahan pertanian di Indonesia adalah teknologi yang belum menyeluruh, pengetahuan akan teknologi modern dalam pengelolaan pertanian belum secara luas diterima oleh para petani. Petani masih cenderung memilih menggunakan peralatan tradisional daripada peralatan teknologi hal tersebut menjadikan faktor penghambat bagi adopsi teknologi dalam sektor pertanian. Hal tersebut sejalan dengan artikel yang dimuat oleh merdeka.com.

**merdeka.com.** “jika melihat data dari riset yang dilakukan DSInnovate dan Crowde 2020 bertajuk *Driving the Growth of Agriculture Technology Ecosystem in Indonesia* ,, menyebutkan dari 33,4 juta petani di Indonesia, hanya 4,5 juta yang sudah mengadopsi teknologi. Masih ada 28,9 juta petani yang belum melek teknologi.”. (Dikutip dari <https://www.merdeka.com/teknologi/baru-30-persen-petani-melek-teknologi.html> pada tanggal 22 Mei 2023)

Berdasarkan berita diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar petani di Indonesia belum melek teknologi. Kurangnya literasi teknologi di kalangan petani menimbulkan berbagai masalah. Petani yang tidak familiar dengan teknologi cenderung kesulitan mengadopsi metode pertanian modern dan efisien, yang dapat meningkatkan produktivitas dan hasil panen mereka. Selain itu, keterbatasan

pengetahuan ini membuat mereka sulit mengakses informasi penting tentang cuaca, pasar, dan praktik pertanian terbaik, sehingga berpotensi menurunkan keuntungan dan keberlanjutan usaha pertanian mereka. Hal tersebut sejalan dengan (Hafidz & Amalia, 2021) yang mengatakan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi. Beberapa di antaranya termasuk kurangnya pengetahuan dan strategi petani dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi pertanian yang telah ada.

Dari beberapa masalah terkait permasalahan petani, maka dibutuhkan intervensi atau campur tangan dari pemerintah selaku penanggungjawab dan pelaksana kebijakan. Intervensi adalah bentuk keterlibatan individu atau kelompok organisasi dengan tujuan khusus. Intervensi ini dilakukan dengan maksud mengurangi dampak masalah-masalah yang dialami oleh petani. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai pengontrol kebijakan dan pengawasterkait isu-isu yang terjadi dalam sektor pertanian (Yesiana et al., 2017). Pelaksanaan intervensi pemerintah yang berupa penciptaan layanan pertanian haruslah diimplementasikan oleh seluruh daerah di Indonesia.

Perwujudan intervensi guna mengatasi permasalahan pertanian juga diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang . Kabupaten Jombang sendiri merupakan kabupaten yang terletak di Jawa Timur, terkenal sebagai daerah penghasil gabah dimana merupakan komoditas utama dalam sektor pertanian di Jombang, membuat padi menjadi tanaman yang paling banyak dibudidayakan di seluruh kecamatan di daerah ini. Dalam hal ini juga petani di Kabupaten Jombang tidak luput menghadapi permasalahan pertanian seperti pelayanan pertanian, pupuk pestisida dan benih, serta rendahnya penyerapan teknologi bagi petani di Kabupaten

Jombang. Sejalan dengan artikel diatas, dikutip dari radarjombang.jawapos.com menyebutkan bahwa :

**radarjombang.jawapos.com** “Minimnya jatah pupuk subsidi untuk petani dikarenakan jatah pupuk subsidi yang diterima Pemkab Jombang dari pemerintah pusat tahun ini berkurang drastis.”Jadi, kita mengajukan sebanyak 24 juta ton, kemampun dari pemerintah untuk penyaluran pupuk subsidi hanya 35 persen,” tegas Kepala Disperta Jombang Moch Rony” (Dikutip dari <https://radarjombang.jawapos.com/politik-pemerintahan/664017172/alokasi-pupuk-subsidi-untuk-jombang-tahun-2024-jeblok-jatah-dari-pusat-tak-sampai-50-persen-dari-pengajuan> pada tanggal 14 Mei 2024)

Hal tersebut juga sejalan dengan artikel yang dimuat oleh kabarjombang.com menyebutkan bahwa pemerataan subsidi pupuk bagi petani di Kabupaten Jombang masih belum merata.

**kabarjombang.com** “Subsidi pupuk merupakan bagian penting dari upaya peningkatan produksi pangan nasional. Namun, sejumlah masalah klasik masih terus menghantui para petani di Jombang. Meskipun Pemerintah Pusat telah menambahkan anggaran sebesar Rp 14 Triliun untuk kebutuhan pupuk subsidi tahun 2024, namun petani di Kabupaten Jombang masih merasakan dampak yang kurang positif sehingga petani harus berbalik menggunakan pupuk non subsidi”. (Dikutip dari <https://kabarjombang.com/pertanian/musim-tanam-padi-tiba-subsidi-pupuk-di-jombang-belum-merata/> pada tanggal 14 Mei 2024)

Selain itu permasalahan pupuk, petani juga kesulitan untuk menyerap teknologi terbaru. Hal tersebut didasari oleh kurangnya peran Dinas Pertanian guna mengatasi permasalahan petani. Sejalan dengan itu,berdasarkan hasil observasi awal dengan Petugas Dinas Pertanian juga menyebutkan bahwa :

“ Sebelum adanya klinik agribisnis, transfer informasi kepada petani dilakukan melalui kunjungan tatap muka satu persatu oleh petugas yang bertanggung jawab pada petani binaannya. Sebelumnya, banyak petani yang tidak mengetahui keberadaan BPP dan jarang datang untuk berkonsultasi. Sebelumnya, masyarakat memiliki stigma bahwa petugas pertanian minim kehadiran dan perannya di tengah masyarakat tani” (Hasi wawancaraobservasi awal dilakukan pada 14 April 2023)

Pelayanan yang belum memadai oleh BPP (Badan Penyuluh Pertanian) di Kabupaten Jombang menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan petani kesulitan untuk memperoleh informasi-informasi terkait pertanian. Berhubungan dengan hasil observasi awal, keterbatasan transfer teknologi juga menjadi masalah yang dihadapi petani. Penyerapan teknologi seharusnya menjadi salah satu bentuk pelayanan kepada petani guna mengatasi permasalahan pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil observasi awal dengan Petugas Dinas Pertanian juga menyebutkan bahwa :

” Perlu diketahui juga, sebagian besar petani di Kabupaten Jombang ini masih menerapkan budaya pertanian yang tradisional juga faktor-faktornya petani yang menggarap masih dalam kalangan tua, sehingga melek teknologi untuk petani-petani di kabupaten Jombang masih terbatas.” (Hasil wawancara observasi awal dilakukan pada 14 April 2023)

Hasil observasi awal diatas juga dikuatkan pada pernyataan dari Kepala Pejabat Penyuluh Pertanian yang menilai masih terhambatnya penyerapan teknologi produksi oleh beberapa faktor-faktor di Kabupaten Jombang, menyebutkan bahwa:

“ Hambatan yang paling terlihat adalah terbatasnya kapasitas produksi dan kurangnya pengetahuan teknis. Klinik agribisnis di Jombang masih dalam tahap awal pertumbuhan. Para anggotanya belum sepenuhnya mendapatkan akses ke teknologi pertanian yang modern, sehingga produksi mereka belum dapat bersaing baik dari segi jumlah maupun kualitas. Selain itu, rantai distribusi dan pemasaran di wilayah tersebut masih kurang berkembang, yang berarti memasarkan produk di luar anggota akan membutuhkan investasi yang lebih besar” (Hasil wawancara observasi awal dilakukan pada 14 April 2023)

Disisi lain, berdirinya klinik agribisnis tidak luput dari unsur regulasi yang sudah ditetapkan. Regulasi di klinik agribisnis menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga manajemen yang baik, menjamin standar kualitas, serta mengatur hak dan tanggung jawab anggota. Selain itu, regulasi memastikan kepatuhan

terhadap kebijakan pemerintah serta landasan hukum dan mendukung keberlanjutan klinik agribisnis. Terkait dengan hal tersebut, didukung oleh pernyataan Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian yang menyebutkan bahwa :

“ Regulasi sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota mematuhi aturan yang berlaku dalam hal produksi, pembagian hasil, dan penggunaan sumber daya. Dengan adanya regulasi, operasional klinik menjadi lebih terorganisir dan efisien, serta memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban anggota. Regulasi juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa praktik agribisnis di klinik sesuai dengan peraturan daerah dan nasional. Regulasi yang baik membantu klinik menghindari pelanggaran hukum, seperti penggunaan lahan ilegal atau distribusi produk tanpa izin. Selain itu, regulasi mendukung keberlanjutan dari aspek lingkungan dan ekonomi dengan mengatur penggunaan input pertanian, seperti pupuk dan pestisida” (Hasil wawancara observasi awal dilakukan pada 14 April 2023)

Dari beberapa penjelasan diatas maka pemerintah Kabupaten Jombang melakukan intervensi pertanian guna mengatasi permasalahan mendasar petani di Kabupaten Jombang. Wujud intervensi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jombang yakni dengan meluncurkan Klinik Agribisnis. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 tentang pembentukan klinik agribisnis di Kabupaten Jombang yang juga selaras dengan dengan artikel yang dimuat oleh [harianbhirawa.co.id](http://harianbhirawa.co.id) yang memuat :

**harianbhirawa.co.id** - Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mengaktifkan klinik agribisnis untuk memperkuat pelayanan kepada petani. Klinik agribisnis ini merupakan layanan konsultasi untuk petani agar mendapatsolusi dari permasalahan-permasalahan yang ada seputar dunia pertanian. “Apalagi semakin hari, masalah yang dihadapi petani semakin beragam. Mulai dari pra tanam dengan persiapan sarana produksi (benih, pupuk), mulai tanam (tenaga kerja, hama penyakit) sampai panen dan pasca panennya (fluktuasi harga),” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Moch Rony” (Dikutip dari <https://www.harianbhirawa.co.id/klinik-agribisnis-di-jombang-siagakan-penyuluh-layani-petani/> pada tanggal 22 April 2023

Berdasarkan artikel diatas menunjukkan adanya klinik agribisnis yaitu

membawahi beberapa hal salah satunya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dengan cara membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya pertanian, seperti lahan, air, pupuk, dan pestisida. Pembentukan Klinik Agribisnis sendiri menjadi upaya untuk mendorong transformasi pertanian dan diharapkan dapat menjawab dan mengatasi permasalahan pertanian di Kabupaten Jombang.

Klinik agribisnis sendiri merupakan wujud dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah guna melaksanakan upaya peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam konsep pembangunan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan fakta dilapangan mengenai pertanian di Kabupaten Jombang yang masih

banyak ditemui permasalahan. Klinik agribisnis diharapkan dapat memperkuat fungsi sistem penyuluhan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, yaitu memfasilitasi akses bagi pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya. Pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Jombang melibatkan berbagai upaya dan inisiatif untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan pertanian.

Akses ke informasi dan teknologi sangat penting dalam pengembangan sektor pertanian, terutama dengan memfasilitasi akses petani ke informasi terbaru mengenai teknologi pertanian, pasar, dan cuaca melalui berbagai platform, termasuk media digital dan klinik agribisnis. Dengan jumlah penduduk yang



sebagian besar bergantung pada mata pencaharian di sektor pertanian, upaya ini menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Jombang. Berbicara mengenai mayoritas penduduk di Kabupaten Jombang bermata pencaharian sebagai petani, hal tersebut didukung oleh data yang dikutip dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Jombang. Berikut adalah data jumlah penduduk sesuai mata pencaharian di Kabupaten Jombang.

**Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Sesuai Jenis Mata Pencaharian di Kabupaten Jombang Periode Tahun 2020-2023**

<b>Jumlah Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian</b>				
<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>
Petani	151,409	125,493	147,329	132,080
Nelayan	253	192	227	141
Peternak	1.541	1,406	1,456	1,207
Bangunan	13,924	10,315	5,980	7,937
Tenaga Pendidik	11,926	12,268	12,539	1,089
Tenaga Kesehatan	2,111	2,186	2,318	2,549
Pedagang	50,367	13,931	34,898	31,719

Sumber : Diolah dari data Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, 2023

Dengan mengacu pada data yang tertera pada tabel di atas, terlihat dengan jelas bahwa mayoritas dari penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Jombang memilih atau tergantung pada mata pencaharian sebagai petani. Tabel tersebut menggambarkan angka atau persentase signifikan dari populasi Kabupaten Jombang yang secara aktif terlibat dalam kegiatan pertanian sebagai sumber utama

penghasilan atau mata pencaharian mereka. Tingginya andil penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dalam wilayah ini mencerminkan pentingnya sektor pertanian dalam perekonomian setempat. Melihat tingginya andil masyarakat Kabupaten Jombang yang bermata pencaharian sebagai petani, hal tersebut berpengaruh pada penggunaan lahan di Kabupaten Jombang itu sendiri. Dilansir dari artikel yang dimuat [jombangkab.go.id](https://jombangkab.go.id) menyebutkan bahwa

**[jombangkab.go.id](https://jombangkab.go.id)** .Berdasarkan BPS Kabupaten Jombang Tahun 2019, penggunaan lahan terbesar adalah untuk kegiatan budidaya pertanian sawah dengan kisaran mencapai 43,21% dari luas wilayah Kabupaten Jombang. Berdasarkan data luas lahan sawah yang ada, berdasarkan jenis pengairannya, maka 80,45% berpengairan teknis, 3,51% sawah ½ teknis, 3,12% sawah irigasi sederhana, 0,05% sawah irigasi desa dan 12,87% sawah tadah hujan (Dikutip dari <https://jombangkab.go.id/pages/keadaan-ekonomi> Diakses pada tanggal 22 Mei 2023)

Berdasarkan berita diatas, Pertanian di Kabupaten Jombang menggunakan lahan yang cukup sehingga pertanian dapat berjalan. Hal tersebut juga didukung oleh tabel dibawah ini :

**Tabel 1. 2 Luas Lahan Pertanian Periode Tahun 2018-2022**

Penggunaan Lu as Lahan Kabup aten Jombang				
Tahun	Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Bukan Pertanian	Jumlah
2018	48.701.0	51.637.0	15.612.0	115.950.0
2019	48.690.0	51.637.0	15.623.0	115.950.0
2020	48.446.0	50.769.0	16.375.0	115.950.0
2021	48.476.3	50.590.0	16.883.7	115.950.0
2022	49.062.1	42.374.1	24.513.8	115.950.0

Sumber : Diolah dari Data Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 yang disajikan diatas menunjukkan bahwa luas penggunaan lahan di Kabupaten Jombang mengalami kenaikan dan penurunan. Jumlah penurunan angka yang cukup signifikan pada penggunaan lahan di Kabupaten Jombang terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 42.374.1 untuk sektor penggunaan lahan pertanian bukan sawah sedangkan persentase yang menunjukkan kenaikan penggunaan luas lahan yang signifikan juga terjadi pada tahun 2022 pada sektor bukan pertanian yakni sebesar 24.513.8 pada sektor bukan pertanian. Menurut (Pradnyawati & Cipta, 2021), adanya luas lahan yang digunakan untuk penanaman berdampak pada jumlah tanaman yang dapat ditanam, yang pada akhirnya akan mempengaruhi produksi tanaman yang dihasilkan. Jika petani memiliki lahan yang luas, maka peluang ekonomi untuk meningkatkan produksi dan pendapatan juga akan lebih besar. Luas lahan sawah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan pendapatan dari hasil panen.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diketahui bahwa para petani di Kabupaten Jombang memerlukan adanya program yang dapat membantu, mengawasi dan membina dalam mengatasi permasalahan pertanian (Istiyowati, 2022). Bentuk intervensi pemerintah Kabupaten Jombang dengan meluncurkan program klinik agribisnis ini guna memperlancar kegiatan pertanian serta memenuhi kebutuhan akses teknologi dan informasi bagi para petani dan demi terwujudnya peningkatan kualitas hidup petani di Kabupaten Jombang. Sejalan dengan itu, Menurut Hughes dalam (Setiyono, 2014a) menjelaskan bahwa intervensi pemerintah dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara yaitu melalui Aspek *Provision* (persediaan) dilakukan

dengan cara pemerintah menyediakan barang atau jasa secara langsung dan merupakan instrumen utama yang digunakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Aspek *Subsidy* (subsidi) dimana instrumen ini dapat berupa bantuan yang diberikan kepada petani dengan tujuan adalah untuk mendorong pihak-pihak yang menerimanya agar menyediakan barang atau jasa tertentu bagi publik, dengan dukungan dari pemerintah. Aspek *Product* (Produksi) merujuk pada kegiatan pemerintah sebagai jembatan memperkenalkan petani kepada aktivitas-aktivitas baru yang memungkinkan dapat dijual dan beredar di pasar bebas. Aspek *Regulation* (regulasi) adalah tindakan pemerintah yang melibatkan penggunaan hukum untuk mempengaruhi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori instrumen intervensi yang dikemukakan oleh Hughes dalam (Setiyono, 2014a). Aspek *provision* yang dijelaskan dalam teori ini yakni intervensi pemerintah dalam menyediakan pelayanan baik jasa maupun barang yang diperlukan oleh sektor pertanian atau agribisnis. Dalam ini, pelayanan jasa maupun barang mencakup kebutuhan penyediaan input pertanian, seperti benih unggul, pupuk, dan peralatan pertanian serta fasilitasi informasi-informasi mengenai pertanian dimana dalam pengaplikasiannya masih belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan sebelum didirikan klinik agribisnis peran BPP (Balai Penyuluh Pertanian) belum berperan secara baik banyak petani yang tidak mengetahui keberadaan BPP (Balai Penyuluh Pertanian) dan jarang datang untuk berkonsultasi. Terkait aspek *subsidy*, dalam klinik agribisnis di Kabupaten Jombang dilakukan berupa subsidi pupuk, benih, atau bantuan harga minimum komoditas.

Dilihat dari penjelasan diatas, aspek subsidi sudah dilaksanakan namun

implementasinya masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal distribusi yang lebih merata, pengawasan, dan edukasi bagi para petani. Kemudian untuk aspek *Production*, klinik agribisnis mendorong dan mendukung melalui penyuluhan, pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan, serta adopsi teknologi pertanian modern. Namun meskipun begitu tidak menampik bahwa masih terdapat kendala-kendala seperti keterbatasan kapasitas produksi dan kurangnya pengetahuan petani. Selanjutnya pada aspek *regulasi*, dimana regulasi memudahkan klinik agribisnis untuk memberikan kejelasan hukum dengan menetapkan aturan yang tegas, sehingga membantu mencegah pelanggaran serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan kebijakan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Jombang bekerja sama dengan Dinas Pertanian memberikan pelayanan dan pendampingan bagi para petani. Diharapkan dengan adanya klinik agribisnis ini para petani mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan petani dan pelaku usaha di sektor pertanian serta mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan pembangunan sektor pertanian. Tentunya dalam proses berjalannya program klinik agribisnis di Kabupaten Jombang ini tidak lepas dari adanya intervensi Dinas Pertanian Jombang selaku penggerak sektor pertanian di Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, peneliti ingin mengangkat penelitian yang berjudul **“Intervensi Pemerintah Dalam Upaya Mengembangkan Sektor Pertanian Melalui Klinik Agribisnis Di Kabupaten Jombang”** dengan menganalisis menggunakan teori dari Hughes dalam Budi Setiyono (2014).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diambil oleh peneliti dengan memperhatikan latar belakang diatas maka diambil **“Bagaimana Intervensi yang dilakukan Dinas**

Pertanian Dalam Penyaluran Informasi Melalui Klinik Agribisnis di Kabupaten Jombang”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas maka tujuan yang diambil oleh penulis yakni untuk mengetahui bagaimana intervensi dari Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pertanian dalam upaya untuk mengedukasi, mendorong serta menjembatani para petani di Kabupaten Jombang melalui Program Kllinik Agribisnis.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang seberapa efektif intervensi pemerintah melalui Klinik Agribisnis di Kabupaten Jombang serta mendorong peningkatan program tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendukung pengembangan agribisnis lokal. Serta dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang ingin mengadakan penelitian seperti ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi beberapa pihak, antara lain :

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini memberikan peluang bagi penulis untuk memperluas pemahaman mengenai kebijakan agribisnis serta intervensi pemerintah dalam sektor pertanian. Selain itu, penulis juga dapat meningkatkan keterampilan dalam menganalisis data dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kebijakan publik serta pengembangan agribisnis.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Jawa Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan kampus, serta menjadi sumber pembelajaran dan rujukan bagi para pembaca.

3. Bagi Instansi (Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Penelitian mengenai intervensi pemerintah melalui Klinik Agribisnis di Kabupaten Jombang diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi Dinas Pertanian, seperti meningkatkan efektivitas program-program agribisnis, membantu petani dalam meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian, serta memfasilitasi penyuluhan dan menyediakan akses informasi yang lebih baik bagi para pelaku usaha pertanian di daerah tersebut.